



Perubahan

RENJA

TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kompleks Perkantoran Bupati Gedung Kembar B Lantai Dasar
Jalan Wolter Monginsidi, Telp. (0541) 662295-6666380
Kode Pos 75511 TENGGARONG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur Alhamdulillah Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.

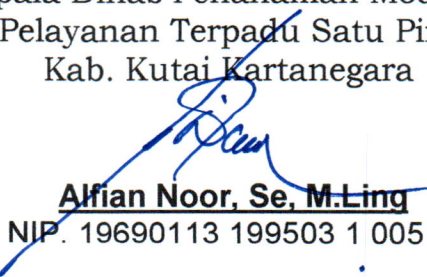
Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran masukan dari semua pihak yang berkepentingan dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara 2023 ini dapat dijadikan acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara “ ***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia*** “

Tenggarong, 29 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara


Alfian Noor, Se, M.Ling
NIP. 19690113 199503 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman	
Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	25
Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	28
4.1. Program dan Kegiatan	28
Bab IV. PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan (RENJA) untuk periode selama 1 (satu) tahun sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang ingin capai dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ini merupakan terjemahan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

b. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD, serta Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Kebijakan Terhadap Kebijakan Program Nasional, Tujuan dan Sasaran PD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA serta Pengukuran capaian kinerja tentang pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan pada tabel 1 berikut :

TABEL 1

**REKAPTULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah 2023 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kkegiatan Tahun Berjalan (2023)			Catatan Penting	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan (2023)	
									Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD 2023	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)*	11=(10/4)*
2	18	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	89	85	86	94.9	90.62		179.9	202.13

2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	60	12	12	14	116.67	1. Dilakukan Penambahan target Output Kegiatan 2. Dilakukan Penambahan Target Ouput Kegiatan	26	43.33
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumkah Dokumen Perencanaan PD	2	2	4	4	100%	1. Dilakukan Penambahan target Output Kegiatan 2. Dilakukan Penambahan Target Ouput Kegiatan	6	300.00
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	dilakukan penyesuaian target output akhir pada renstra	2	200.00

2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	dilakukan penyesuaian target output akhir pada renstra	2	200.00
2	18	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	dilakukan penyesuaian target output akhir pada renstra	2	200.00
2	18	01	2.01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	dilakukan penyesuaian target output akhir pada renstra	2	200.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	6	8	6	75%	1. Dilakukan Penambahan target Output Kegiatan 2. Dilakukan Penambahan Target Ouput Kegiatan	12	200.00
2	18	01	2.02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	82	100	60	60	Dilakukan penyesuaian target output akhir pada renstra	142	142.00
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	98	98	84	71	85%		169	172.45

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **2023**

2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	100%		2	200.00
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	5	1	1	100%		6	120.00
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3	3	24	12	50%		15	500.00

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

2023

2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100%		2	200.00
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	3	100	3	2	66.6667		102	3400.00
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	1	1	1	100%		2	200.00
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	2	2	4	2	50%		4	200.00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	1	82	100	60	60		142	14200.00
2	18	01	2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	300	300	2	1	50%		301	100.33

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.05		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100	60	60%		61	6100.00
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	15	15	15	100%		30	200.00
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	75	75	102	102	100%		177	236.00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100	82	85	100	117.65		182	182.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35	35	70	70	100%		105	300.00
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	40	40	100%		41	4100.00
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	22	22	22	22	100%		44	200.00
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	500	500	1	1	100%		501	100.20
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	200	400	400	100%		600	300.00
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500	500	500	500	100%		1000	200.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah kegiatan/berita	24	24	0	0	0%		24	100.00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	10	82	100	60	60.00		142	1420.00
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10	82	46	0	0%		82	820.00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100	100	100	60	60.00		160	160.00
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	2500	2	2	100%		2502	100.08
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	12	7	58%		19	158.33

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	50	3	3	100%		53	106.00
18	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	62	12	12	100%		74	151.02
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	108	108	100	60	60.00		168	155.56
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48	48	48	48	100%		96	200.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	60	60	60	100%		120	200.00
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	3267	641	640	536	83.75		1177	36.03
	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	1	1	0	0	0.00			
18	02	2.01	01		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal	1	1	0	0	0%		1	100.00
18	02	2.01	02		Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Arah kebijakan Penanaman modal	1	1	0	0	0%		1	100.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	13	1	2	3	150.00		4	30.77
2	18	02	2.02	02	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	3	2	3	150%		6	600.00
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya review naskah Akademis dan PERBUP	1	1	0	0	0%		1	100.00
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	350	567	260	203	128.08		770	220.00
2	18	03	2.01		Penyelenggara Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Industri/Hilirisasi	1460	4	4	2	50.00		6	0.41
2	18	02	2.02	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	4	4	2	50%		6	150.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	02	2.02	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1	1	2	2	100%		3	300.00
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin	4750	6173	850	2007	42.35		8180	172.21
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	91.73	92.35	87.75	90.31	102.92		182.66	199.13

2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500	500	500	416	83%		916	183.20
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	500	500	2000	2926	146%		3426	685.20

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	500	500	100	3	3%		503	100.60
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	500	500	12	7	58%		507	101.40
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN	82.34	36.22	30.47	53.54	56.91		89.76	109.01

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

2023

2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	2240		370	200	54.05		200	8.93
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	550	550	100	13	13%		563	102.36
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	550	550	100	36	36%		586	106.55
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	250	250	100	7	7%		257	102.80

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

					Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan									
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	15	15	3	3	100.00		18	120.00
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Maintance Aplikasi	15	15	3	3	100.00		18	120.00

2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	80	65	4436	127	3%		192	240.00
---	----	----	------	----	---	--	----	----	------	-----	----	--	-----	--------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Terkait Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada renstra 2021-2026 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1 diatas, walaupun pada saat itu pandemi Covid 19 serta isu politik lainnya masih berpengaruh pada capaian target akan tetapi untuk tahun 2021 Dinas Penanam Modal dapat mencapai target tersebut. Dan untuk Tahun 2022 dimana pandemic Covid 19 sudah mulai menurun dimana nilai atau capaian kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2022 dengan target nilai 85 menurut Organisasi kami tercapai atau capaian kinerjanya senilai 100 % dikarenakan tidak adanya evaluasi/penilaian dari Tim evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (sumber data Bidang Sekretariat DPMPTSP). Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu planning penganggaran yang kurang tepat sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran guna memenuhi target kinerja, dan dalam hal upaya untuk meningkatkan indikator kinerja ke – 1 (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dalam hal ini Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal antara lain penganggaran, pengendalian akuntansi, efektifitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Sedangkan capaian kinerja Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2022 sebesar 9,78 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan investasi sebesar 1,71% atau capaian kinerja sebesar 5300% (Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal). Target kinerja juga melebihi target, hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memprediksi dengan tepat kapan dampak Pandemi Covid 19 terhadap perekonomian global akan berakhir, akan tetapi di Akhir triwulan IV pada Tahun 2021 pertumbuhan investasi menunjukan gejala yang mulai normal, sehingga investasi melonjak naik sekitar 36,22 %. Namun revisi target dalam RPJMD yang terkait dengan normalnya dampak

ekonomi akibat krisis global tidak dapat dilakukan, karena perubahan pada RPJMD memiliki ketentuan administrasi tersendiri. Dimana terjadi perubahan iklim investasi yang sangat cepat setelah Pandemi Covid 19, yang juga dipicu oleh investasi Ibu Kota Negara (gencarnya pemerintah daerah melakukan promosi Kutai Kartanegara sebagai mitra IKN) dan kebutuhan investasi energi akibat krisis energi dunia (karena melonjaknya nilai investasi di kutai Kartanegara pada sektor SDA sampai dengan 86% (persen) sebagai pengungkit investasi) hal ini dilihat dari nilai Capaian Pertumbuhan Investasi yang diambil dari Penambahan Modal Tetap Bruto (PMTB), pada 2 tahun terakhir ini menunjukkan realisasi investasi ataupun pertumbuhan investasi melonjak sangat tinggi. (Data dukung dari Aplikasi NSWI (National Single Window for Investment), dimana target investasi berada pada range 30% sampai dengan 50% atau sekitar 7 Triliun Rupiah sampai dengan 9 Triliun Rupiah. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya keadaran para pelaku usaha dalam melakukan pelaporan kegiatan usahanya pada aplikasi LKPM dan juga masih banyaknya para pelaku usaha yang melakukan investasi tidak tercatat dan tidak melakukan pelaporan, dengan situasi tersebut DPMPTSP berusaha melakukan kegiatan pendampingan langsung ke lokasi usaha untuk membantu para pelaku usaha dalam melakukan pelaporan kegiatan usahanya, solusi/rekomendasinya adalah untuk mendapatkan hasil realisasi dan capaian kinerja diharapkan dapat ditentukan perhitungan untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan target sebelumnya, disamping itu juga diharapkan kepada seluruh stakeholder yang berperan dalam peningkatan iklim investasi daerah dapat meningkatkan capaian investasi setiap tahunnya salah satunya dengan cara pengembangan inovasi dan kreativitas para pengusaha.

Dan untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 senilai 87,12 dan realisasinya 91,35 atau capaian kinerja sebesar 104,86% (sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Target kinerja

melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, yang mana Berdasarkan hasil analisis kinerja masing- masing indikator survei kepuasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kertanegara dengan nilai tertinggi adalah perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan dengan nilai rata-rata 3,86 sedangkan nilai yang terendah adalah kualitas sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata 3,50. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dalam mengambil kebijakan. Pencapaian target dapat dilihat diuraikan pada tabel 2 berikut :

TABEL 2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)		(13)
1	Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)			3.88	3.95	4.02	4.09	4.16	3,84	9,78	7,2	Dilakukan Perubahan Target Kinerja pada Renja Perubahan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87.12	87.75	88.25	89.52	91.73	82	91,35	93,12	

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menerima Dana FCPF dari World Bank sebagai Program Pengurangan Emisi (ERP) Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund) berkontribusi pada pencapaian pengurangan emisi secara

nasional dan internasional melalui REDD+ dengan pendekatan nasional dan pelaksanaan sub- nasional. Program ini juga diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai target ketahanan iklim dan komitmen internasional. Dengan dukungan FCPF-Carbon Fund, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan program pengurangan emisi yang berfokus di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.47/MENLHK/PPI/KEU.0/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 Earmarking / Budget Tagging dalam rangka Penyelenggaraan Program Pengurangan Emisi Forest Carbon Partnership Facility – World Bank dan Surat Sekretaris Jenderal KLHK No. S/13/SETJEN/ROKLN/KLN.0/01/2023 perihal Alokasi Pembagian Manfaat Dana *Result-Based Payment* (RBP) Program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) *Carbon Fund* Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pembagian dana *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) Dinas Penanaman Modal dan PTSP menerima dana sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pelaku usaha dan mendorong kemudahan berinvestasi bagi para calon investor di Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2023 merupakan perwujudan dari usaha untuk mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara menyusun kegiatan dengan fokus kepada pemetaan potensi investasi daerah, insentif/fasilitasi kemudahan berusaha, promosi dan pelayanan perizinan.
- b. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara pada tahun 2023, disusun berdasarkan dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2021-2026, menjadi 5 (lima) program, yaitu :
 1. Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal;
Program Iklim Investasi Penanaman Modal pada tahun 2023 memiliki paket Pekerjaan yaitu Penyusunan Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota yang mempunyai tujuan melakukan pemetaan potensi dan peluang usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai akhir tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan beberapa kajian yaitu Kajian Industri Hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kutai Kartanegara, Kajian Industri Pendukung Ibu Kota

Nusantara, dan Kajian Potensi Investasi Rencana Aksi RUPM Kutai Kartanegara.

2. Program Promosi Penanaman Modal;

Program Promosi Penanaman Modal pada tahun 2023 berfokus pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA. Dan pada tahun 2023 Bidang Promosi Penanaman Modal akan melakukan Penyusunan Proposal Investasi Project Ready To Offer (IPRO).

3. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan pelayanan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Serta memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat ataupun stakeholder di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan yang tahun akan diluncurkan yaitu Inovasi Pelayanan Drive True dimana pelayanan perizinan yang mudah dan cepat contohnya Perizinan dibidang Kesehatan dan Nomor Induk Berusaha. Disamping itu program ini juga mendapatkan tambahan dana *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) sebesar Rp. 250.000.000, untuk pendampingan dan sosialisasi perizinan kehutanan dengan target 72 Desa tersebar di 20 Kecamatan

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk memantau pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kutai

Kartanegara. Dan juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan kegiatan usaha kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan Pelaporan Kegiatan Usahanya (LKPM). Pada kegiatan ini juga terdapat dana *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) sebesar Rp. 150.000.000,- untuk Sosialisasi Perijinan Kehutanan Sosial dengan target 8 izin Perkebunan aktif.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Serta 1 program penunjang yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan.

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan renstra Tahun 2021-2026 yang terdiri dari 6 (Enam), program, 13 (Tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah diusulkan adalah sebesar Rp. **19.587.197.718,00 menjadi Rp. 26.534.438.040,00** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan pada table 5 dan Table Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Tabel.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub/Kegi atan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/Be rkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL				19,987,197,718				26,534,438,040	0		19,160,696,573
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	86	Kab. Kutai Kartane gara	14,651,197,718	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	86	Kab. Kutai Kartane gara	16,695,629,364	0		14,860,696,573

Tabel.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub/Kegi atan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/Be rkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL				19,987,197,718				26,534,438,040	0		19,160,696,573
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	86	Kab. Kutai Kartane gara	14,651,197,718	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	86	Kab. Kutai Kartane gara	16,695,629,364	0		14,860,696,573

2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	418,995,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	16 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	732,274,612	313,279,612	17 Dokumen	585,000,000
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	198,995,000	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	198,995,000	0	3 Dokumen	266,625,000
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	25,000,000	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	25,000,000	0	4 Dokumen	85,000,000
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	20,000,000	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	20,000,000			

2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	20,000,000	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	20,000,000	0		0
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	20,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	20,000,000	0		0
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	135,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	448,279,612.00	313,279,612	6 Laporan	233,375,000
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	Kab. Kutai Kartanegara	10,272,759,897	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	Kab. Kutai Kartanegara	8.803.041.195	764.689.800	100%	10,245,137,878

2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	30,000,000	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	12,015,000	-17,985,000	1 Dokumen	30,000,000
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	54,999,000	Cakupan Administrasi BMD	5 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	136,488,500	81,489,500	3 Dokumen	110,000,000
2	18	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	14,999,000	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	14,999,000	0	1 Dokumen	40,000,000
2	18	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	40,000,000	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	121,489,500	81,489,500	2 laporan	70,000,000
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Admintrasi Kepegawaian	100%	Kab. Kutai Kartanegara	364,500,000	Cakupan Admintrasi Kepegawaian	100%	Kab. Kutai Kartanegara	736,340,000	371,840,000	100%	552,000,000
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara	127,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	Kab. Kutai Kartanegara	220,780,000	93,780,000		127,000,000

2	18	1	2.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	50,000,000	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	28,060,000			100,000,000
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	Kab. Kutai Kartane gara	75,000,000	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	Kab. Kutai Kartane gara	75,000,000	0	15 Aparat ur	75,000,000
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementas i peraturan perundang- undangan	50 Orang	Kab. Kutai Kartane gara	112,500,000	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementas i peraturan perundang- undangan	102 Orang	Kab. Kutai Kartane gara	412,500,000	300,000,000	75 Aparat ur	250,000,000
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum	100%	Kab. Kutai Kartane gara	1,311,935,145	Cakupan Adminstrasi Umum	100%	Kab. Kutai Kartane gara	2,061,935,145	750,000,000	100%	1,254,951,019
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartane gara	170,000,000	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	70 Paket	Kab. Kutai Kartane gara	270,000,000	100,000,000	35 unit	170,000,000

2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara	200,000,000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 Paket	Kab. Kutai Kartanegara	350,000,000	150,000,000	25 jenis	250,000,000
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Kartanegara	100,000,000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	22 Paket	Kab. Kutai Kartanegara	100,000,000	0	22 jenis	100,000,000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	30,000,000	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	30,000,000			30,000,000
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	761,935,145	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	1,261,935,145	500,000,000	200 O/K	561,935,145
2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	50,000,000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	50,000,000	0	500 Dokumen	50,000,000
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah kegiatan/berita									12 Dokumen	93,015,874

2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	100%	Kab. Kutai Kartanegara	461,000,000	Cakupan Pengadaan BMD	100%	Kab. Kutai Kartanegara	568,606,000	107,606,000		361,000,000
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	461,000,000	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	46 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	568.606.000	107,606,000	4 Unit	361,000,000
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100%	Kab. Kutai Kartanegara	1,444,158,676	Cakupan Penyediaan Jasa	100%	Kab. Kutai Kartanegara	1,915,262,822	471,104,146		1,364,757,676
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	20,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	10,450,500	-9,549,500	2500 Laporan	5,599,000
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	185,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	135,000,000	-50,000,000	12 laporan	120,000,000
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	149,480,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	209,480,000	60,000,000	50 jenis	149,480,000

2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	1,089,678,676	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	1,560,332,322	470,653,646	12 Laporan	1,089,678,676
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan n BMD	100%	Kab. Kutai Kartanegara	322,850,000	Cakupan Pemeliharaan n BMD	100%	Kab. Kutai Kartanegara	322,850,000	0		387,850,000
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48 unit	Kab. Kutai Kartanegara	263,620,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48 unit	Kab. Kutai Kartanegara	263,620,000	0	48 unit	263,620,000
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 unit	Kab. Kutai Kartanegara	59,230,000	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 unit	Kab. Kutai Kartanegara	59,230,000	0	60 unit	59,230,000
2	18	1	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		Kab. Kutai Kartanegara				Kab. Kutai Kartanegara			2 Unit	65,000,000

2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	640 Proyek	Kab. Kutai Kartanegara	1,000,000,000	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	640 Proyek	Kab. Kutai Kartanegara	1,000,000,000	0		1,050,000,000
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											200,000,000
2	18	2	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota										30 Dokumen	200,000,000
2	2	18	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan Daerah / Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1,000,000,000	Jumlah peraturan Daerah / Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1,000,000,000	0	2 Dokumen	850,000,000

2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota									1 Dokumen	200,000,000
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1,000,000,000	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1,000,000,000	0	1 Dokumen	650,000,000
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	260 Investor	Kab. Kutai Kartanegara	950,000,000	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	260 Investor	Kab. Kutai Kartanegara	1,295,494,400	345,494,400		1,200,000,000
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Industri/Hilirisasi	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	950,000,000		2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1,295,494,400	345,494,400	4 Dokumen	1,200,000,000

2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	200,000,000	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	300,000,000	100,000,000	3 dokumen	200,000,000
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	750,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	995,494,400	245,494,400	4 Dokumen	1,000,000,000
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	850 Izin	Kab. Kutai Kartanegara	1,250,000,000	Jumlah Penerbitan Izin	1000 Izin	Kab. Kutai Kartanegara	1,250,000,000	0	750 Izin	850,000,000
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	87.75	Kab. Kutai Kartanegara	1,250,000,000	Indek Kepuasan Masyarakat	87.75	Kab. Kutai Kartanegara	1,250,000,000	0		850,000,000

2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	300,000,000	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	300,000,000	0	500 Pelaku Usaha	200,000,000
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	650,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	500 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	650,000,000	0	300 Kegiatan Usaha	250,000,000

2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	100 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	200,000,000	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	100 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	200,000,000	0	100 Orang	200,000,000
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	100,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	100,000,000	0	12 Kegiatan Usaha	200,000,000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Peurunan Nilai Realisasi Investasi	30,47	Kab. Kutai Kartanegara	1,436,000,000	Kenaikan/Peurunan Nilai Realisasi Investasi	30,47	Kab. Kutai Kartanegara	1,645,700,000	209,700,000		700,000,000

2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	370 Pelaku Usaha/Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara	1,436,000,000	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	550 Pelaku Usaha/Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara	1,645,700,000	209,700,000		700,000,000
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan usaha	Kab. Kutai Kartanegara	350,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan usaha	Kab. Kutai Kartanegara	350,000,000	0	100 perusahaan /400 UKMK	0
2	18	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan									100 Kegiatan Usaha	200,000,000
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	540,018,800	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	935,718,800	359,700,000		0

2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko									300 Pelaku Usaha	200,000,000
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan usaha	Kab. Kutai Kartanegara	545,981,200	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan usaha	Kab. Kutai Kartanegara	395,981,200	-150,000,000		0
2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan									100 Kegiatan Usaha	300,000,000

2	18	6			PROGRAM PENGELOLA AN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	Kab. Kutai Kartane gara	700,000,000	Jumlah Aplikasi	15	Kab. Kutai Kartane gara	6,030,445,366	5,330,445,366	15 Aplikasi	500,000,000
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Pengemb an dan Maintance Aplikasi	3 Aplikasi	Kab. Kutai Kartane gara	700,000,000	Pengemb an dan Maintance Aplikasi	3	Kab. Kutai Kartane gara	6,030,445,366	5,330,445,366		500,000,000
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	127 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	700,000,000	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	4436 Dokumen	Kab. Kutai Kartane gara	6,030,445,366	5,330,445,366	3 Dokumen	500,000,000

BAB V. PENUTUP

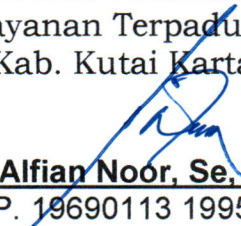
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) yang merupakan dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat menunjang pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara “ ***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia*** ”

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2023 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance*.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Tenggarong, 29 Agustus 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara,


Alfian Noor, Se. M.Ling
NIP. 19690113 199503 1 005